



KINERJA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Margareth I.R Rantung¹, Steven V. Tarore², Esther Posumah³

Prodi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Manado, Indonesia

Email: margarethrantung@unima.ac.id

Abstract

This study aims to determine and describe the performance of the North Sulawesi Regional Inspectorate. The research method used is qualitative descriptive. The number of informants in this study were 4 people. Data collection uses observation, interview and documentation techniques. Data analysis through Data Reduction, Data Presentation and Drawing Conclusions. The results of the study show that based on the results of the research and discussion related to the performance of the North Sulawesi Regional Inspectorate, it can be concluded that employees at the North Sulawesi regional inspectorate office in terms of carrying out the supervisory function have not been maximized, this can be seen from the following indicators. 1) Productivity Performance is not good enough. Performance Quality that shows the development of each employee. 2) The accuracy is not yet effective because it is influenced by several factors.

Keywords: North Sulawesi, Regional Inspectorate, Performance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja Inspektorat Daerah Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian ini sebanyak 4 orang. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data melalui Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan kinerja Inspektorat Daerah Sulawesi Utara dapat disimpulkan bahwa pegawai pada kantor inspektorat daerah Sulawesi Utara dalam hal menjalankan fungsi pengawasan belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut 1) Kinerja Produktivitas belum cukup baik. Kualitas Kinerja yang menunjukkan perkembangan setiap pegawai. 2) Ketepatan yang belum efektif karena dipengaruhi oleh beberapa faktor.

Kata Kunci: Kinerja, Inspektorat Daerah, Sulawesi Utara.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pemerintahan baik pusat maupun daerah saat ini dilaksanakan dengan semangat reformasi, prinsip-prinsip reformasi yang dilaksanakan di Indonesia saat ini dilaksanakan secara penuh, mulai dari politik, hukum, ekonomi kerakyatan dan budaya, dengan tujuan untuk memperbaiki pondasi. kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu semangat reformasi negara Indonesia adalah reformasi kelembagaan birokrasi, tujuan reformasi birokrasi adalah agar kegiatan administrasi publik dapat terselenggara dengan benar, tepat, transparan, efektif, efisien dan bertanggung jawab sehingga asas good governance . diikuti. dapat diaplikasikan. . Sehubungan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, diperlukan penguatan tanggung jawab eksekutif setiap lembaga negara untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di masyarakat. Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dijelaskan apa yang dimaksud dengan tanggung jawab kinerja, yang menyatakan komitmen instansi pemerintah untuk bertanggung jawab atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang diperintahkan oleh pemangku kepentingan secara terukur untuk mencapai misi organisasi. sasaran/sasaran kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara sistematis (Madani, 2011).

Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara merupakan aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada gubernur tugas pengawas. Terkadang kedisiplinan karyawan untuk mengikuti aturan waktu kerja dan melakukan tugas lain diremehkan. Keadaan ini disebabkan karena tingkat kesadaran pegawai yang tugasnya belum optimal sehingga terkadang pegawai lebih mementingkan keuntungan pribadi atau kelompoknya.

Pelaksanaan tugas pokok organisasi tidak akan berhasil jika penerapan faktor pengendalian tidak direncanakan. Pengawasan yang buruk berdampak pada efektifitas pelaksanaan kinerja yang tidak sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, pedoman diterapkan untuk mendukung efektivitas rencana pemantauan. Manajer atau pemimpin harus melakukan efisiensi dan kontrol karena tanpa efisiensi dan kontrol, pelanggaran akan terjadi. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan yang efektif, terutama terhadap tugas pokok pengelolaan dan pembangunan yang tujuannya untuk mendukung terselenggaranya pemerintahan negara yang

bersih dan berwibawa, serta diperlukan pelaksanaan pengawasan dalam pelaksanaannya. tugas yang berkaitan dengan kegiatan administrasi dan pembangunan.

Tugas pengawasan pemerintah daerah bersifat bertahap dan terpadu dalam mekanisme pengawasan dan pengendalian, sedangkan tujuan pengawasan adalah pendeteksian penyimpangan dari rencana atau tujuan. Kegiatannya antara lain mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan, merekomendasikan pengurangan pemborosan, mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai tujuan sesuai rencana, mengevaluasi kinerja pejabat pemerintah seperti lembaga pelatihan dan lembaga kliring, dan memberikan masukan kepada manajemen puncak (manajer) tentang kondisi dan solusi distorsi. Birokrasi Fenomena tidak efektif dan tidak efektifnya peran penyelenggara negara tidak hanya bersifat umum, tetapi juga bersifat spesifik di lingkungan pemerintah daerah, oleh karena itu diperlukan bentuk koordinasi yang tepat dan komitmen yang besar. Melakukan tugas pengendalian secara efektif.

Badan Pengawasan Kabupaten Sulawesi Utara merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengawasi kegiatan pemerintah daerah. Jika salah satu tugas yang layak adalah mencegah penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kemudian, tugas kedua adalah memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan mengkaji dua asas, yakni Badan Pengawas Daerah Provinsi dalam bentuk vertikal dan Gubernur sebagai penerima mandat untuk mendukung pelaksanaan jajaran pimpinan. , penyelia atau asisten penyelia digunakan bila perlu, menandatangani surat perintah tugas pengawasan dan evaluasi.

Sekretariat Audit berupaya melaksanakan dan memperkuat pelaksanaan pengawasan operasional agar seluruh bagian wilayah kerja organisasi memikirkan dan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik mungkin sehingga dapat memberikan kontribusi yang bernilai terbaik. Untuk menyelesaikan tugas mereka. Dengan demikian, diasumsikan bahwa seseorang dapat mengatur segala macam aktivitas kerja sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan (Arifin, 2014). Berdasarkan hasil kajian terhadap kegiatan Inspektorat Daerah Sulut, terdapat permasalahan bahwa fungsi pengawasan selama ini sebenarnya tidak dilakukan sebulan sekali, namun nyatanya tidak sama dengan yang seharusnya. Keterlambatan pengumpulan data yang digunakan dalam pemeriksaan, dan selain itu tidak ada pemeriksaan selama pemeriksaan. dapat menilai kejanggalan yang sering terjadi dalam penyelewengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah,

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya, penulis merasa perlu untuk menyelidiki dan menjelaskan kegiatan Kantor Inspeksi Daerah Sulawesi Utara. Oleh karena

itu, penulis mengangkat judul: Kegiatan Kanwil Prov Sulut Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini memfokuskan pada kegiatan Kanwil Prov Sulut. Dengan demikian, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana cara kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara? Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: Mendeskripsikan dan menganalisis kegiatan lembaga inspeksi daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan informasi terkait kegiatan Badan Inspeksi Daerah Sulawesi Utara dan khususnya di bidang administrasi publik. Lembaga inspeksi daerah dan lembaga lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Fokus penelitian merupakan inti yang didapatkan dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari studi kepustakaan ilmiah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu. Dalam hal ini pengguna menggunakan teknik wawancara in-depth interview. Menurut (Sugiyono, 2018), yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Berdasarkan penjelasan tersebut maka fokus penelitian ini adalah kinerja inspektorat daerah provinsi Sulawesi utara meliputi Produktivitas , dan Ketepatan waktu (Sugiyono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kinerja Inspektorat Daerah Sulawesi Utara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan beberapa informan, dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam Kinerja Insepktorat Daerah Sulawesi utara dilihat dari indikator Produktivitas belum maksimal, hal ini ditandai dengan kemampuan Pegawai dalam mengidentifikasi masalah-masalah tugas pokok dan fungsi, dan juga inovasi yang selalu diberikan oleh setiap pegawai. Kinerja pegawai juga dapat dilihat dari bagaimana mereka menjalankan tugas dan fungsi sekaligus tanggung jawab yang berdasarkan dengan SOP atau peraturan yang berlaku, sehingga kinerja yang dihasilkan baik dan tepat dan jika Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dialkukan oleh peneliti terkait kinerja inspektorat daerah Sulawesi utara berdasarkan dengan indikator Kualitas, dapat ditarik kesimpulan

bahwa Kinerja Inspektorat daerah Sulawesi utara sudah menunjukkan kualitas yang baik (Silaban, 2021). Karena, pelayanan publik merupakan suatu pemberian layanan yang diberikan kepada masyarakat baik dalam aspek yang kecil maupun luas demi kebutuhan masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang sudah diterapkan melalui peraturan yang telah dibuat (Ali dan Rizky, 2021). Dengan demikian, perlunya peningkatan kinerja yang dilakukan oleh para pegawai untuk memberikan pelayanan yang baik dalam mewujudkan kinerja yang lebih optimal. Tentu, hal ini akan berpengaruh besar terhadap kepuasan publik terhadap akuntabilitas pegawai pada kinerjanya.

Pelaksanaan kinerja para pegawai selama ini masih terdapat masalah atau faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja dan dalam hal ini pegawai diwajibkan untuk menyelesaikan masalah mereka atau Problem Solving (Ladzi, 2012). Kekuatan dalam memperoleh kinerja yang baik, seharusnya harus ditanamkan nilai-nilai sesuai tanggung jawab sebagai pemberi layanan kepada publik. Berbagai persoalan yang dihadapi oleh pegawai adalah untuk memberikan pelajaran berarti pada setiap proses penyelenggaraan pemerintahan, sehingga kinerja pegawai bisa lebih bagus untuk menghadapi berbagai persoalan kedepan.

Pelayanan publik adalah setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terkait pada suatu produk secara fisik, mengatakan bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Tujuan pelaksanaan peningkatan pelayanan publik dapat diwujudkan yaitu tercapainya kepuasan pelanggan (masyarakat) yang dilayani (Tanjung dan Hajar, 2018). Sedangkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dalam Pasolong mengemukakan bahwa pelayanan adalah segala bentuk kegiatan pelayanan dalam bentuk barang dan jasa dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat (Muhibun, 2015).

Pengertian “performance” atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika.

2. Ketepatan Waktu

Loina beranggapan bahwa pelayanan merupakan “suatu proses keseluruhan dari pembentukan citra perusahaan, baik melalui media berita, membentuk budaya perusahaan

secara internal, maupun melakukan komunikasi tentang pandangan perusahaan kepada para pemimpin pemerintahan serta public lainnya yang berkepentingan” sedangkan menurut Pelayanan adalah “proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung”. Kepercayaan yang diberikan terhadap lamanya atau tepatnya suatu layanan, pasti akan menimbulkan suasana yang tenang kepada siapa saja yang ingin berurusan tentang pelayanan publik (Ali, 2018). Jelasnya waktu tersebut, akan membuat mereka bisa mengatur jam kerja atau hal lain yang dapat dikerjakan. Ketepatan waktu adalah hal yang sangat penting yang harus dilaksanakan sesuai harapan karena sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Berdasarkan dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti terkait, kinerja inspektorat daerah Sulawesi utara, berdasarkan dengan indikator ketepatan waktu, dapat ditarik kesimpulan bahwa terkait pihak internal mau eksternal atau objek pengawasan dapat dinyatakan bahwa inspektorat dalam melakukan pengawasannya sudah tepat waktu dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Gibson dalam Kasmir menyatakan bahwa kinerja individu adalah dasar kinerja organisasi yang sangat dipengaruhi oleh karakteristik individu, motivasi individu, pengharapan, dan penilaian yang dilakukan oleh manajemen terhadap pencapaian hasil kerja individu (Winarno, 2015). Dengan demikian, pemberian layanan sesuai dengan waktu yang relatif tidak lama, akan memberikan dampak positif bagi yang dilayani dan juga harus disertai dengan perilaku yang tercermin dari pemberi layanan (pegawai) kepada publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan dengan hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait Kinerja Inspektorat Daerah Sulawesi Utara, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kinerja pegawai di kantor inspektorat daerah Sulawesi utara dalam hal menjalankan fungsi pengawasan belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari indikator berikut.

1. Produktivitas

Indikator Produktivitas belum cukup maksimal, hal ini ditandai dengan kemampuan Pegawai dalam mengidentifikasi masalah-masalah tugas pokok dan fungsi belum berdasarkan dengan bidang mereka masing-masing, dan juga inovasi yang selalu diberikan oleh setiap pegawai, belum diimplementasikan dengan baik.

2. Ketepatan Waktu

Inspektorat dalam praktiknya sudah melakukan pengawasan sesuai waktu yang ditentukan, tetapi masih belum sesuai dengan standar yang ditetapkan. Namun hal

tersebut sudah ada perbaikan dan mulai diimplementasikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, K. (2018). *Analisis Kualitas Pelayanan Pencairan Dana Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Kppn) Percontohan Yogyakarta* (Thesis, Universitas Gadjah Mada).

Ali, K., & Rizky, R. N. (2021). Analisis Kualitas Pelayanan Pencairan Dana Di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Medan I. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 11(2).

Instruksi presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Muhlis Madani. (2011). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH- 20 Desember 2016- BD.2016/NO.495.

Moleong. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

.....(2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cetakan ke. Bandung: CV ALFABETA.

Satispi, Evi, and S P M Si. (2018). "Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik."

Tanjung, I. S., & Hajar, S. (2018). Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui Penerapan Model Total Quality Service (TQS) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Hampan Perak. *Kumpulan Penelitian dan Pengabdian Dosen*, 1(1).

Tahir, Arifin. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung : Penerbit Alfabeta.

J. Miles, M.B; Huberman, A.M; Saldana, *Qualitative data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. USA: Sage Publication. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press. 2014.*

"Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan." .

Safroni, M Ladzi. (2012). *Manajemen Dan Reformasi Pelayanan Publik Dalam Konteks Birokrasi Indonesia*. Surabaya: Aditya media.

Kinerja Inspektorat Daerah...

Rantung M. I. R, Tarore S. V, Posumah E (2023)

Ebenhezer Silaban - 2021 - repository.umsu.ac.id kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Utara

Mukarom, Zaenal, Muhibudin. 2015. Manajemen Pelayanan Publik. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Winarno, Budi. (2014). Kebijakan Publik Era globalisasi : teori, proses, dan studi kasus komparatif. Yogyakarta : CAPS (Center Of Academic publishing service).

.